



LAPORAN KEUANGAN

Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)

Balai KIPM Surabaya I

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2024

AUDITED



Jl. Raya Bandar Udara Ir. H. Juanda No. 23

Sidoarjo, Jawa Timur 61254

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Surabaya I adalah salah satu entitas akuntansi dibawah Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan **Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Surabaya I** mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kaidah-Kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada **Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Surabaya I**. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk

memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Sidoarjo, 7 Mei 2025

Pt. Kepala,



Didik Srinoto, S.Pi., M.P.

NIP. 196906161989031004

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Pernyataan Tanggung jawab	iv
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	4
II. Neraca	5
III. Laporan Operasional	7
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	8
V. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)	9
A. Penjelasan Umum	9
B. Penjelasan Atas Pos - Pos Laporan Realisasi Anggaran	26
C. Penjelasan Atas Pos - Pos Neraca	35
D. Penjelasan Atas Pos - Pos Laporan Operasional	54
E. Penjelasan Atas Perubahan Laporan Perubahan Ekuitas	67
F. Pengungkapan – Pengungkapan Lainnya	74
VI. Lampiran dan Daftar	



**Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan
Keamanan Hasil Perikanan Surabaya I**

Jl. Raya Bandara Ir. H. Juanda Nomor 23, Sidoarjo, 031-8688099

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Surabaya I yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan **Tahun Anggaran 2024** sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sidoarjo, 7 Mei 2025

Plt. Kepala,



Didik Srinoto, S.Pi., M.P.

NIP. 196906161989031004

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Balai KIPM Surabaya I Tahun 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024.

Realisasi Pendapatan Negara per 31 Desember 2024 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 7.161.301.314 atau mencapai 99,81 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp. 7.175.010.000

Realisasi Belanja Negara per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 15.097.880.829 atau mencapai 98,44 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 15.337.348.000

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas per 31 Desember 2024. Nilai Aset per 31 Desember 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 32.993.070.884 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp.240.620.331; Piutang Jangka Panjang (netto) sebesar Rp. 0 ; Aset Tetap (netto) sebesar Rp. 32.752.450.553 dan Aset Lainnya (netto) sebesar Rp. 0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp. 136.076.519 dan Rp.32.856.994.365.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non-operasional,

surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 7.159.810.000 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp. (14.958.452.672) sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp. (7.798.642.672). Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp. 15.000 dan sebesar Rp. 0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp. (7.798.627.672).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2024 adalah sebesar Rp. 33.426.928.920 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp. (7.798.642.672). ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp. 3.682 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. 7.228.689.435 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2024 adalah senilai Rp. 32.856.994.365.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2024 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BALAI KIPM SURABAYA I
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023*(Dalam Rupiah)*

URAIAN	CATATAN	31-Dec-24		% thd Angg	TA 2023
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	7,175,010,000	7,161,066,314	99.81	7,482,299,212
JUMLAH PENDAPATAN		7,175,010,000	7,161,066,314	99.81	7,482,299,212
BELANJA	B.2				
Belanja Pegawai	B.3	7,720,922,000	7,667,963,360	99.31	12,349,051,083
Belanja Barang	B.4	6,431,471,000	6,245,100,028	97.10	6,862,402,126
Belanja Modal	B.5	1,184,955,000	1,184,817,441	99.99	653,076,000
Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-	-	-
JUMLAH BELANJA	B.2	15,337,348,000	15,097,880,829	98.44	19,864,529,209

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

BALAI KIPM SURABAYA I
N E R A C A
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN		CATATAN	2024	2023
ASET				
ASET LANCAR				
	Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
	Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
	Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-
	Piutang Bukan Pajak	C.4	259,073	736,314
	Bagian Lancar TP/TGR	C.5	-	-
	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	-	-
	Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.7	(1,295)	(3,682)
	Belanja Dibayar di Muka	C.8	-	22,875,000
	Pendapatan yang Masih harus Diterima	C.9	-	-
	Persediaan	C.10	240,362,553	250,852,391
	Jumlah Aset Lancar		240,620,331	274,460,023
PIUTANG JANGKA PANJANG				
	Tagihan TP/TGR	C.11	-	-
	Tagihan Penjualan Angsuran	C.12	-	-
	Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.13	-	-
	Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP				
	Tanah	C.14	23,356,710,000	23,356,710,000
	Peralatan dan Mesin	C.15	10,055,150,215	13,920,548,236
	Gedung dan Bangunan	C.16	9,686,349,336	9,686,349,336
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.17	224,579,100	224,579,100
	Aset Tetap Lainnya	C.18	83,490,000	83,490,000
	Konstruksi dalam pengerjaan	C.19	-	-
	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.20	(10,653,828,098)	(14,081,040,809)
	Jumlah Aset Tetap		32,752,450,553	33,190,635,863
ASET LAINNYA				
	Aset Tidak Berwujud	C.21	-	-
	Aset Lain-Lain	C.22	-	-
	Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.23	-	-

			-	-
	Jumlah Aset Lainnya		-	-
JUMLAH ASET			32,993,070,884	33,465,095,886
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
	Uang Muka dari KPPN	C.24	-	-
	Utang kepada Pihak Ketiga	C.25	136,076,519	38,166,966
	Utang Yang Belum Ditagihkan	C.26	-	-
	Beban yang Masih Harus Dibayar	C.27	-	-
	Utang Jangka Pendek Lainnya	C.28	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		136,076,519	38,166,966
JUMLAH KEWAJIBAN			136,076,519	38,166,966
EKUITAS				
	Ekuitas	C.29	32,856,994,365	33,426,928,920
	JUMLAH EKUITAS		32,856,994,365	33,426,928,920
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS			32,993,070,884	33,465,095,886

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

BALAI KIPM SURABAYA I
LAPORAN OPERASIONAL
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2024	2023
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	7,159,810,000	7,463,700,000
JUMLAH PENDAPATAN		7,159,810,000	7,463,700,000
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	7,708,373,548	12,347,088,569
Beban Persediaan	D.3	508,853,287	979,524,329
Beban Barang dan Jasa	D.4	4,075,061,988	3,474,398,751
Beban Pemeliharaan	D.5	946,871,872	980,657,546
Beban Perjalanan Dinas	D.6	934,880,911	1,542,140,301
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7		
Beban Bantuan Sosial	D.8		
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	784,409,771	1,065,077,311
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	1,295	3,682
JUMLAH BEBAN		14,958,452,672	20,388,890,489
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(7,798,642,672)	(12,925,190,489)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
	D.11		
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar		15,000	6,873,000
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		(755,000)	10,599,000
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		(740,000)	3,726,000
Surplus Penjualan Aset Nonlancar			
Defisit Penjualan Aset Non Lancar			
Defisit Selisih Kurs			
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			8,000,212
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			8,000,212
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		15,000	14,873,212
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(7,798,627,672)	(12,910,317,277)
POS LUAR BIASA			
	D.12		
Pendapatan PNB		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(7,798,627,672)	(12,910,317,277)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

BALAI KIPM SURABAYA I
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2024	2023
EKUITAS AWAL	E.1	33,426,928,920	33,846,657,845
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(7,798,627,672)	(12,910,317,277)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3		
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN			
KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3.1	-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.2	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.3	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.4	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.5	-	-
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.6	3,682	-
JUMLAH		3,682	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	7,228,689,435	12,490,588,352
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.5	(238,548,916)	(419,728,925)
EKUITAS AKHIR	E.6	32,856,994,365	33,426,928,920

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Balai KIPM Surabaya I

*Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis*

Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Surabaya I didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. sesuai dengan PMK 2005/PMK.011/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal. Berkedudukan di Jalan Raya Ir. H. Juanda Nomor 23, Semabung, Gedangan, Sidoarjo, Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Surabaya I mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan fungsi utamanya melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK) ke/di/keluar/masuk wilayah Negara Republik Indonesia, melakukan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan serta penerapan sistem manajemen mutu. Selain itu, BKIPM Surabaya I juga memiliki tugas dan fungsi yakni melakukan pengawasan keamanan hayati ikan. Melalui peran Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Surabaya I diharapkan kualitas Laporan Keuangan dapat ditingkatkan kualitasnya yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Surabaya I didirikan sebagai salah satu bagian integral dari Badan Pengendalian dan

Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dan mempunyai peranan yang strategis dalam pengembangan dan penyelamatan usaha perikanan di Indonesia, Upaya perlindungan sumberdaya ikan di Indonesia dari ancaman Hama Penyakit Ikan berbahaya di lakukan melalui kegiatan tindakan karantina ikan terhadap media pembawa hama penyakit ikan di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran di seluruh Indonesia. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 92 /PERMEN - KP/2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan, Balai KIPM Surabaya I mempunyai tugas, fungsi dan struktur organisasi sebagai berikut :

- a. Tugas : melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, penerapan sistem manajemen mutu, dan pengawasan keamanan hayati ikan.
- b. Fungsi :
 - penyusunan pemantauan dan evaluasi rencana, program dan anggaran serta pelaporan dibidang pelayanan operasional karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan,
 - pelaksanaan pencegahan masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina dari luar negeri

- dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
- pelaksanaan pencegahan keluar dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan tertentu dari wilayah Negara Republik Indonesia yang dipersyaratkan Negara tujuan;
 - pelaksanaan tindakan karantina terhadap media pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina/Hama dan Penyakit Ikan tertentu, jenis ikan dilindungi, dilarang, dibatasi, dan invasif, serta benda lain;
 - pelaksanaan pengujian terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina, Hama dan Penyakit Ikan tertentu, mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
 - pelaksanaan sertifikasi kesehatan ikan, sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan, dan sertifikasi keamanan hayati (biosecurity);
 - pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan laboratorium dan instalasi;
 - pelaksanaan pembuatan koleksi media pembawa, Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan/atau Hama dan Penyakit Ikan tertentu;
 - pelaksanaan pemantauan terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina, mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
 - pelaksanaan pengawasan terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan keamanan hayati ikan;

- pelaksanaan surveilan terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan keamanan hayati ikan;
- pelaksanaan inspeksi, verifikasi, surveilans, audit, dan pengambilan contoh ikan dan hasil perikanan di Unit Pengolahan Ikan dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu;
- penerapan sistem manajemen mutu pelayanan operasional dan laboratorium;
- penindakan pelanggaran perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
- pengumpulan, pengolahan data dan informasi perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan; dan
- pelaksanaan urusan ketatausahaan.

c. Struktur Organisasi

Sesuai Permen KP No. 92 Tahun 2020 tentang Susunan organisasi Balai KIPM Surabaya I, terdiri atas:

1. Subbagian Umum yang mempunyai tugas melakukan penyusunan pemantauan dan evaluasi rencana, program dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, rumah tangga serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan.
2. Kelompok Jabatan Fungsional.

Untuk mewujudkan tujuan diatas Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Surabaya I berkomitmen dengan :

VISI:

“Hasil Perikanan Yang Sehat, Bermutu, Aman Konsumsi dan Terpercaya.”

MISI :

1. *Mewujudkan produk perikanan yang berdaya saing melalui penjaminan persyaratan mutu produk hasil perikanan.*
2. *Mewujudkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan melalui pengendalian Hama Penyakit Ikan Karantina (HPIK) dan jenis agen yang dilindungi, dilarang dan dibatasi.*
3. *Mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri melalui pola konsumsi ikan yang bermutu serta budidaya ikan yang bebas dari hama dan penyakit.*

TUJUAN :

“Melindungi kelestarian sumber daya hayati perikanan dan kelautan dari Hama Penyakit Ikan Karantina (HPIK) dan jenis agen yang dilindungi, dilarang, dibatasi serta menjamin mutu hasil perikanan nasional”.

SASARAN STRATEGIS :

1. *Meningkatnya kepatuhan (compliance) pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang undangan kelautan dan perikanan di wilayah pengeluaran/pemasukan ekspor, impor, dan antar*

- area kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan dalam ekspor, impor dan antar area;*
- 2. Meningkatnya jumlah jenis penyakit ikan karantina yang dapat dicegah penyebarannya antar zona, melalui sertifikasi kesehatan ikan ekspor, impor dan antar area;*
 - 3. Menurunnya jumlah kasus penolakan/penahanan ekspor hasil perikanan per negara mitra;*
 - 4. Meningkatnya Unit Pengolahan Ikan yang memenuhi persyaratan ekspor serta;*
 - 5. Meningkatnya pencegahan penyebaran jenis agen hayati yang dilindungi, dilarang dan bersifat invasif melalui kajian dan analisis resiko.*

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Balai KIPM Surabaya I.

Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAIBA dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan

Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

*Basis
Akuntansi*

A.3. Basis Akuntansi

Kantor Balai KIPM Surabaya I menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Balai KIPM Surabaya I dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber

daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Balai KIPM Surabaya I. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Balai KIPM Surabaya I adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima

pada Kas Umum Negara (KUN).

- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan

membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya

kewajiban.

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui

apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset

tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara

berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara

berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban jangka pendek meliputi Utang

Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Kantor Balai KIPM Surabaya I melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2024 sebanyak 22 kali dan dengan perubahan total pagu anggaran DIPA awal sebesar Rp. 21.359.900.000 menjadi Rp 15.337.348.000:

1. Revisi I: Realokasi Anggaran ke Badan Karantina Indonesia
2. Revisi II: Pemuktahiran Halaman III DIPA TW-1
3. Revisi III: Pemuktahiran Halaman III DIPA TW-1
4. Revisi IV: Pemuktahiran Halaman III DIPA TW-2
5. Revisi V: Pemuktahiran KPA
6. Revisi VI: Pemuktahiran Halaman III DIPA TW-2
7. Revisi VII: Pemuktahiran KPA
8. Revisi VIII: Pemuktahiran KPA
9. Revisi IX: Revisi Buka Blokir KRO 3990
10. Revisi X: Pemuktahiran KPA
11. Revisi XI: Pemuktahiran KPA
12. Revisi XII: Realokasi Anggaran ke Balai KIPM Surabaya II
13. Revisi XIII: Pemuktahiran KPA
14. Revisi XIV: Pemuktahiran KPA
15. Revisi XV: Pemuktahiran KPA
16. Revisi XVI: Halaman III DIPA Triwulan IV
17. Revisi XVII: Halaman III DIPA Triwulan IV
18. Revisi XVIII: Pemuktahiran KPA
19. Revisi XIX: Penambahan Belanja Operasional
20. Revisi XX: Pemuktahiran KPA
21. Revisi XXI: Blokir Perjalanan Dinas

22. Revisi XXII: Pemuktahiran KPA

Adapun rincian DIPA Balai KIPM Surabaya I berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja sebagai berikut :

URAIAN	ANGGARAN 2024 SEMULA	ANGGARAN 2024 MENJADI
Pendapatan		
Pendapatan Jasa	6,454,225,000	7,175,010,000
Pendapatan Lain-lain		
Jumlah Pendapatan	6,454,225,000	7,175,010,000
Belanja		
Belanja Pegawai	12,896,331,000	7,720,922,000
Belanja Barang	8,463,569,000	6,431,471,000
Belanja Modal	0	1,184,955,000
Belanja Bantuan Sosial	0	0
Jumlah Belanja	21,359,900,000	15,337,348,000

Realisasi
Pendapatan
Rp 7.161.301.314

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan Balai KIPM Surabaya I untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 7.161.301.314 atau mencapai 99,81 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp 7.175.010.000. Pendapatan Balai KIPM Surabaya I terdiri dari Pendapatan Jasa dan Pendapatan Lain-lain dengan rincian sebagai berikut:

URAIAN	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Jasa	7,161,301,314	7,482,299,212	-4.29
Pendapatan Penjualan Aset	-	-	#DIV/0!
Pendapatan TAYL	-	-	#DIV/0!
Jumlah	7,161,301,314	7,482,299,212	-4.29

Realisasi Pendapatan Jasa per 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar (4,29) persen dibandingkan TA 2023.

Realisasi Belanja
Rp. 15.097.880.829

B.2 Belanja

Realisasi Belanja Balai KIPM Surabaya I per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 15.097.880.829 atau 98,44% dari anggaran belanja sebesar Rp. 15.337.348.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja adalah sebagai berikut:

*Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja
per 31 Desember 2024*

Uraian	2024		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	7,720,922,000	7,667,963,360	99.31
Belanja Barang	6,431,471,000	6,245,100,028	97.10
Belanja Modal	1,184,955,000	1,184,817,441	99.99
Belanja Bantuan Sosial	-		#DIV/0!
Total Belanja Kotor	15,337,348,000	15,097,880,829	98.44
Pengembalian			
Jumlah	15,337,348,000	15,097,880,829	98.44

Dibandingkan dengan TA 2023, Realisasi Belanja TA 2024 mengalami penurunan sebesar (24%) seperti tertera pada tabel berikut:

*Perbandingan Realisasi Belanja
Per 31 Desember 2024 dan 2023*

URAIAN	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	7,667,963,360	12,349,051,083	(37.91)
Belanja Barang	6,245,100,028	6,862,402,126	(9.00)
Belanja Modal	1,184,817,441	653,076,000	81.42
Belanja Bantuan Sosial			-
Jumlah	15,097,880,829	19,864,529,209	(24.00)

Belanja Pegawai
Rp. 7.667.963.360

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Balai KIPM Surabaya I per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 7.667.963.360, mengalami penurunan sebesar 15,34% dari TA 2023 Rp. 9.057.461.083. Hal ini disebabkan oleh adanya beberapa pegawai yang mutasi ke Badan Karantina Indonesia.

Perbandingan Belanja Pegawai
per 31 Desember 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	7,667,963,360	9,057,461,083	(15.34)
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS	-	-	-
Belanja Honorarium	-	-	-
Belanja Lembur	-	-	-
Belanja Vakasi	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	7,667,963,360	9,057,461,083	(15.34)
Pengembalian Belanja Pegawai		-	#DIV/0!
Jumlah Belanja	7,667,963,360	9,057,461,083	(15.34)

Belanja Barang
Rp. 6.245.100.028

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Balai KIPM Surabaya I per 31 Desember 2024 adalah Rp. 6.245.100.028, mengalami penurunan sebesar 9 % dari Realisasi Belanja Barang TA 2023 yaitu Rp. 6.862.402.126,-.

Perbandingan Belanja Barang
Per 31 Desember 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023
Belanja Barang Operasional	1,966,776,203	1,977,593,485
Belanja Barang Non Operasional	201,989,763	267,097,939
Belanja Barang Persediaan	371,118,249	928,477,793
Belanja Jasa	1,826,180,730	1,235,932,136
Belanja Pemeliharaan	944,154,172	911,160,472

Belanja Perjalanan Dalam Negeri	934,880,911	1,542,140,301	(39.38)
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masy.			-
Jumlah Belanja Kotor	6,245,100,028	6,862,402,126	(9.00)
Pengembalian Belanja	-	-	
Jumlah Belanja	6,245,100,028	6,862,402,126	(9.00)

Belanja Modal
Rp. 1.184.817.441

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Balai KIPM Surabaya I per 31 Desember 2024 sebesar Rp 1.184.817.441 mengalami kenaikan sebesar 81,42 % dari Realisasi Belanja Modal TA 2023 yaitu Rp. 653.076.000,-

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal
Per 31 Desember 2024 dan 2023*

URAIAN	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1,184,817,441	653,076,000	81.42
Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin		0	#DIV/0!
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	#DIV/0!
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal Lainnya	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal BLU	0	0	#DIV/0!
Jumlah Belanja Kotor	1,184,817,441	653,076,000	81.42
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	1,184,817,441	653,076,000	81.42

Belanja Modal
Tanah
Rp. 0

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Pada periode ini tidak terdapat belanja Modal Tanah pada Balai KIPM Surabaya I.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal
31 Desember 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	0,00

Belanja Modal
Peralatan dan
Mesin
Rp. 1.184.817.441

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 1.184.817.441 dan realisasi TA 2023 sebesar Rp. 653.076.000. Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar 81,42% dibandingkan TA 2023.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Per 31 Desember 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1,184,817,441	653,076,000	81.42
Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin		0	#DIV/0!
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	#DIV/0!
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal Lainnya	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal BLU	0	0	#DIV/0!
Jumlah Belanja Kotor	1,184,817,441	653,076,000	81.42
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	1,184,817,441	653,076,000	81.42

Rincian belanja modal sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut:

NAMA UAKPB : 032.13.0500.427542.000 - BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU D
JENIS TRANSAKSI : 101 Pembelian

AKUN NERACA / SUBSUB KELOMPOK BARANG		SAT
KODE	URAIAN	
1	2	3
132111	Peralatan dan Mesin	
3.05.01.04.020	Lemari Display	Buah
3.05.01.04.024	Laci Box	Buah
3.05.01.05.057	Pintu Elektrik (yang Memakai Akses)	Buah
3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	Buah
3.05.02.01.020	Kursi Fiber Glas/Plastik	Buah
3.05.02.04.001	Lemari Es	Buah
3.05.02.06.002	Televisi	Buah

Belanja Modal
Gedung dan
Bangunan
Rp. 0

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Pada periode ini tidak terdapat belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Balai KIPM Surabaya I.

*Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan
Per 31 Desember 2024 dan 2023*

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	NAIK (TURUN) %
Gedung Balai KIPM Sby I	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	0,00

Belanja Modal
Jalan, Irigasi dan
Jaringan
Rp. 0

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Tidak terdapat realisasi pada belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan pada tahun ini maupun tahun sebelumnya.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	Naik (Turun)
Belanja Modal Jaringan	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jaringan	0	0	#DIV/0!
Jumlah Belanja Kotor	0	0	#DIV/0!
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	#DIV/0!

Belanja Modal
Penambahan Nilai
Peralatan dan
Mesin
Rp. 0

B.5.5 Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0.

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	Naik (Turun)
Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	0	0	#DIV/0!
	0	0	#DIV/0!
Jumlah Belanja Kotor	0	0	#DIV/0!
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	#DIV/0!

Belanja Modal
Penambahan Nilai
Gedung dan
Bangunan
Rp. 0

B.5.6 Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0,-.

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	Naik (Turun)
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	0	0	#DIV/0!
	0	0	#DIV/0!
Jumlah Belanja Kotor	0	0	#DIV/0!
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	#DIV/0!

*Belanja Modal
Lainnya
Rp. 0*

B.5.7 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp. 0 dan Rp. 0. Tidak terdapat realisasi Belanja Modal Lainnya pada tahun 2024 maupun tahun sebelumnya.

*Belanja Bantuan
Sosial Rp. 0*

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp. 0 dan Rp. 0. Tidak terdapat realisasi belanja bantuan sosial pada Balai KIPM Surabaya I.

*Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial
Per 31 Desember 2024 dan 2023*

URAIAN	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	NAIK (TURUN) %
Kelompok Pendidikan Jaya Maju	0	0	#DIV/0!
Kelompok Pendidikan Cenderawasih	0	0	#DIV/0!
Jumlah Belanja Kotor	0	0	#DIV/0!
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	#DIV/0!

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp. 0*

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Balai KIPM Surabaya I per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp 0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

*Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
Per 31 Desember 2024 dan 2023*

Keterangan	TA 2024	TA 2023
Uang Tunai di Brankas	0	0
Uang di Rekening Bank	0	0
Kwitansi UP	0	0
Jumlah	0	0

Rincian di atas sesuai dengan berita acara pemeriksaan kas dan rekonsiliasi terlampir, dengan posisi saldo Buku Kas Umum sebesar Rp. 0,- dan nomor bukti terakhir : 00168/DRPP/427542/2024 pada tanggal 31 Desember 2024.

*Kas di Bendahara
Penerimaan
Rp. 0*

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan

Negara Bukan Pajak.

Dengan adanya sistem pembayaran secara elektronik melalui mesin EDC, pengguna jasa karantina langsung membayar tagihan/billing tersebut melalui mesin EDC.

*Rincian Kas di Bendahara Penerimaan
Per 31 Desember 2024 dan 2023*

Keterangan	TA 2024	TA 2023
Uang Tunai	-	-
Bank MANDIRI	-	-
Jumlah	-	-

Rincian kas di bendahara penerimaan sesuai dengan berita acara pemeriksaan kas dan rekonsiliasi tanggal 1 Januari 2025 dengan posisi saldo Buku Kas Umum Rp. 0,- dan nomor bukti terakhir : - terlampir pada laporan keuangan Balai KIPM Surabaya I tahun anggaran 2024.

*Kas Lainnya dan
Setara Kas Rp. 0*

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 30 Desember 2024 dan 2023 masing - masing Rp. 0 dan Rp. 0.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

*Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas
Per 31 Desember 2024 dan 2023*

Keterangan	TA 2024	TA 2023
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	-	-
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	-	-
Kas Lainnya di KL dari Hibah yang Belum Disahkan	-	-
Jumlah	-	-

Piutang PNBP
Rp 259.073

C.4 Piutang PNBP

Saldo Piutang PNBP per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp. 259.073. dan Rp. 736.314. Piutang PNBP merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang PNBP disajikan sebagai berikut:

Rincian Piutang PNBP
per 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	TA 2024	TA 2023
Piutang PNBP	259,073	736,314
Piutang Lainnya	-	-
Jumlah	259,073	736,314

Rincian Piutang PNBP Tahun 2024	Nilai
Pengembalian tunjangan kinerja Pegawai bulan Desember 2024 sesuai NTPN Nomor : FE6E261QVCSGKNVJ tanggal 10-01-2025	185,073
Pengembalian Uang Makan PNS bulan Desember 2024 sesuai NTPN Nomor : 8D3DE48VVNNNQNMK tanggal 10-01-2025	74,000
Jumlah	259,073

Bagian Lancar
Tagihan TP/TGR
Rp. 0

C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar TP/TGR adalah sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar TP/TGR
per 31 Desember 2024 dan 2023

No	Nama	TA 2024	TA 2023
1		-	-
2		-	-
Jumlah		-	-

Bagian Lancar TPA
Rp. 0

C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar TPA
per 31 Desember 2024 dan 2023

No	Nama	TA 2024	TA 2023
1		-	-
Jumlah		-	-

Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang Lancar
Rp. (1.295)

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp. (1.295) dan Rp. (3.682).

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar
Per 31 Desember 2024 dan 2023

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	259,073	0.50%	1,295
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan		50%	

	-		-
Macet	-	100%	-
Jumlah	259,073		1,295
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	-	0.50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan		50%	-
Macet		100%	-
Jumlah	-		-
Bagian Lancar TPA			
Lancar	-	0.50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan		50%	-
Macet		100%	-
Jumlah	-		-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	259,073		1,295

Belanja Dibayar di
Muka Rp. 0

C.8 Belanja Dibayar di Muka

Saldo Belanja Dibayar di Muka per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0,-. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

Rincian Belanja Dibayar di Muka
per 31 Desember 2024 dan 2023

Jenis	TA 2024	TA 2023
Pembayaran Internet	-	-
Pembayaran Sewa Peralatan dan Mesin	-	-
Pembayaran Sewa Gedung	-	-
Jumlah	-	-

Pendapatan yang
Masih Harus
Diterima Rp. 0

C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31

Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0, merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa. Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima berdasarkan jenis pendapatan sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima
Per 31 Desember 2024 dan 2023*

Jenis	TA 2024	TA 2023
Pendapatan Jasa Pelatihan	-	-
Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	-	-
Jumlah	-	-

*Persediaan
Rp. 240.362.553*

C.10 Persediaan

Nilai Persediaan Balai KIPM Surabaya I per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 240.362.553. Mengalami penurunan sebesar Rp (10.489.838) dibandingkan periode yang sama tahun 2023 yaitu Rp. 250.852.391. Rincian Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023

Jenis	TA 2024	TA 2023
Barang Konsumsi	139,189,460	167,345,126
Barang untuk Pemeliharaan		
Suku Cadang	11,546,710	14,257,910
Pita Cukai, Materai dan Leges		
Persediaan lainnya		
Persediaan bahan baku	89,626,383	69,249,355
Jumlah	240,362,553	250,852,391

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik sesuai dengan Berita Acara Opname Fisik Persediaan Nomor : B.4900/BKIPM.SBY.I/PL.450/XII/2024 tgl 31 Desember 2024 .

Tagihan TP/TGR
Rp. 0

C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya. Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Tagihan TP/TGR
per 31 Desember 2024 dan 2023

No	Debitur	TA 2024	TA 2023
1			
Jumlah		-	-

Tagihan Penjualan
Angsuran
Rp0

C.12 Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi. Rincian Tagihan PA untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Rincian Tagihan TPA per 31 Desember 2024 dan 2023

No	Debitur	TA 2024	TA 2023
1		-	-
Jumlah		-	-

Penyisihan Piutang
Tak Tertagih –
Piutang Jangka
Panjang
Rp. 0

C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp.0 dan Rp. 0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang untuk masing-masing kualitas piutang adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2024

Kualitas Piutang	Nilai Piutang JK Panjang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar	-	0,50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-	-	-
Tagihan PA			
Lancar	-	0,50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-	-	-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-	-	-

Tanah
Rp.
23.356.710.000

C.14 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Kantor Balai KIPM Surabaya I per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp. 23.356.710.000 dan Rp 23.356.710.000. Tidak terdapat kenaikan nilai aset tanah pada tahun ini. Mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	23.356.710.000
Mutasi tambah:	
Pembelian	0
Mutasi kurang:	
Revaluasi aset	-
Penyitaan pengadilan	0
Saldo per 30 September 2024	23.356.710.000

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

*Rincian Tanah
per 31 Desember 2024*

No	KIB	Luas	Nilai	Nilai
1	2.01.01.04.008.1	996 M2	11.724.414.000	Jl Raya Juanda No 23
2	2.01.01.04.008.2	782 M2	2.193.238.000	Banyuwangi
3	2.01.01.04.008.3	235 M2	744.363.000	Kwangsan, Sidoarjo
4	2.01.01.04.008.4	500 M2	5.885.750.000	Jl Raya Juanda No 23
5	2.01.01.04.008.5	270 M2	2.808.945.000	Jl Raya Juanda No 23
Jumlah			23.356.710.000	-

*Peralatan dan
Mesin
Rp.
10.055.150.215*

C.15 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap Balai KIPM Surabaya I berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp. 10.055.150.215 dan Rp. 13.920.548.236. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Ringkasan Mutasi Peralatan dan Mesin
Per Jenis Transaksi Balai KIPM Surabaya I
Periode Tahun 2024, Per 31 Desember 2024

Kode Trn	Uraian	Intra		Ekstra	
		Unit	Nilai	Unit	Nilai
Saldo Awal Per 01 Januari 2024 (Audited)		1.070	13.920.548.236	6	4.783.350
Mutasi Tambah		196	1.205.317.441	-	-
100	Penambahan Saldo Awal	-	-	-	-
101	Pembelian	195	1.184.817.441	-	-
102	Transfer Masuk	-	-	-	-
105	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	-	-	-	-
107	Reklasifikasi Masuk	-	-	-	-
177	Reklas Dari Aset Lainnya Ke Aset Tetap	1	20.500.000	-	-
202	Pengembangan Nilai Aset	-	-	-	-
204	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (+)	-	-	-	-
208	Pengembangan Melalui KDP	-	-	-	-
Mutasi Kurang		232	5.070.715.462	6	4.783.350
204	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (-)	-	-	-	-
302	Transfer Keluar	184	4.785.984.452	6	4.783.350
304	Reklasifikasi Keluar	-	-	-	-
305	Koreksi Pencatatan	-	-	-	-
308	Usulan Barang Hilang Ke Pengelola	-	-	-	-
401	Penghentian Aset Penggunaan	48	284.731.010	-	-
Saldo Akhir Per 31 Desember 2024 (Unaudited)		1.034	10.055.150.215	-	-

Gedung dan
Bangunan
Rp. 9.686.349.336

C.16 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp. 9.686.349.336 dan Rp. 9.686.349.336. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Ringkasan Mutasi Gedung dan Bangunan
Per Jenis Transaksi Balai KIPM Surabaya I
Periode Tahun Anggaran 2024,
Per 31 Desember 2024

Kode Trn	Uraian	Intra		Ekstra	
		Unit	Nilai	Unit	Nilai
Saldo Awal Per 01 Januari 2024 (Audited)		11	9,686,349,336	1	6,000,000
Mutasi Tambah		-	-	-	-
101	Pembelian	-	-	-	-
105	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	-	-	-	-
107	Reklasifikasi Masuk	-	-	-	-
113	Penyelesaian Pembangunan Langsung	-	-	-	-
121	Reklasifikasi Masuk Hasil Inventarisasi	-	-	-	-
130	Koreksi barang Berlebih hasil Inventarisasi	-	-	-	-
177	Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	-	-	-	-
202	Pengembangan Nilai Aset	-	-	-	-
208	Pengembangan Melalui KDP	-	-	-	-
223	Koreksi Semu Hasil Penilaian Kembali	-	-	-	-
225	Koreksi Kesalah Input IP (+)	-	-	-	-
245	Koreksi Barang Berlebih Penilaian Kembali	-	-	-	-
238	Koreksi Hasil Revaluasi Reklasifikasi Keluar	-	-	-	-
333	Koreksi Beban Kerugian Penghapusan Reval	-	-	-	-
334	Koreksi ekuitas akibat Koreksi Revaluasi	-	-	-	-
335	Koreksi Reklas Keluar Akibat Penilaian Kembali	-	-	-	-
Mutasi Kurang		-	-	-	-
204	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (-)	-	-	-	-
224	Koreksi Penilaian Kembali BMN	-	-	-	-
226	Koreksi Semu Hasil Koreksi Hasil revaluasi	-	-	-	-
229	Koreksi Revaluasi atas BMN yg tidak ditemukan	-	-	-	-
240	Koreksi Reklas Masuk Akibat Penilaian 225	-	-	-	-
225	Koreksi Kesalah Input IP (+)	-	-	-	-
305	Koreksi Pencatatan	-	-	-	-
321	Reklasifikasi Keluar Hasil Inventarisasi	-	-	-	-
401	Penghentian Aset Dari Penggunaan	-	-	-	-
Saldo Akhir Per 31 Desember 2024 (Unaudited)		11	9,686,349,336	1	6,000,000

Pada periode tahun anggaran 2024 tidak terdapat penambahan aset gedung dan bangunan.

Jalan, Jaringan dan
Irigasi Rp.
224.579.100

C.17 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 224.579.100 dan Rp. 224.579.100. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Ringkasan Mutasi Jalan dan Jembatan
Per Jenis Transaksi Balai KIPM Surabaya I
Periode Triwulan III Tahun Anggaran 2024,
Per 31 Desember 2024

Kode Trn	Uraian	Intra	
		Luas	Nilai
Saldo Awal Per 01 Januari 2024 (Audited)		637	208,196,000
Mutasi Tambah		-	-
101	Pembelian	-	-
121	Reklasifikasi Masuk Hasil Inventarisasi	-	-
202	Pengembangan Nilai Aset	-	-
223	Koreksi Semu Hasil Penilaian Kembali	-	-
224	Koreksi Penilaian Kembali BMN	-	-
225	Koreksi Kesalahan Inpt IP	-	-
Mutasi Kurang		-	-
225	Koreksi Kesalahan Inpt IP	-	-
226	Koreksi Semu Hasil Koreksi Hasil revaluasi	-	-
229	Koreksi Revaluasi BMN tidak Ditemukan	-	-
301	Penghapusan	-	-
305	Koreksi Pencatatan	-	-
401	Penghentian Aset Dari Penggunaan	-	-
Saldo Akhir Per 31 Desember 2024 (Unaudited)		637	208,196,000

Ringkasan Mutasi Irigasi
Per Jenis Transaksi Balai KIPM Surabaya I
Periode Tahun Anggaran 2024,
Per 31 Desember 2024

Kode Trn	Uraian	Intra	
		Luas	Nilai
Saldo Awal Per 01 Januari 2024 (Audited)		1	7,128,000
Mutasi Tambah		-	-
107	Reklasifikasi Masuk	-	-
202	Pengembangan Nilai Aset	-	-
204	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (+)	-	-
225	Koreksi Kesalahan Inpu IP	-	-
Mutasi Kurang		-	-
225	Koreksi Kesalahan Inpu IP	-	-
301	Penghapusan	-	-
304	Reklasifikasi Keluar	-	-
305	Koreksi Pencatatan	-	-
401	Penghentian Aset Dari Penggunaan	-	-
Saldo Akhir Per 31 Desember 2024 (Unaudited)		1	7,128,000

Ringkasan Mutasi Jaringan
Per Jenis Transaksi Balai KIPM Surabaya I
Periode Tahun Anggaran 2024, Per 31 Desember 2024

Kode Trn	Uraian	Intra	
		Unit	Nilai
Saldo Awal Per 01 Januari 2024 (Audited)		2	9,255,100
Mutasi Tambah		-	-
101	Pembelian	-	-
202	Pengembangan Nilai Aset	-	-
208	Pengembangan Melalui KDP	-	-
Mutasi Kurang		-	-
401	Penghentian Aset Dari Penggunaan	-	-
Saldo Akhir Per 31 Desember 2024 (Unaudited)		2	9,255,100

Aset Tetap Lainnya
Rp. 83.490.000

C.18 Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp. 83.490.000 dan Rp. 83.490.000 . Aset Tetap Lainnya terdiri dari 12 unit peralatan musik modern/band. Tidak terdapat mutasi tambah atau kurang pada periode ini, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Ringkasan Mutasi Aset Tetap Lainnya
Per Jenis Transaksi Balai KIPM Surabaya I
Periode Tahun Anggaran 2024, Per 31 Desember 2024

Kode Trn	Uraian	Intra	
		Unit	Nilai
Saldo Awal Per 01 Januari 2024 (Audited)		-	-
Mutasi Tambah		12	83,490,000
101	Pembelian	-	-
107	Reklasifikasi Masuk	12	83,490,000
Mutasi Kurang		-	-
304	Reklasifikasi Keluar	-	-
401	Penghentian Aset Dari Penggunaan	-	-
Saldo Akhir Per 31 Desember 2024 (Unaudited)		12	83,490,000

Rincian Aset Tetap Lainnya berupa peralatan musik sejumlah 12 unit dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Barang	Unit	Nilai	Uraian Barang
1	Alat Musik Modern/Band	1	5.500.000	Gillmore
2	Alat Musik Modern/Band	1	15.730.000	Mapex Tornado
3	Alat Musik Modern/Band	1	8.800.000	Cort
4	Alat Musik Modern/Band	1	1.485.000	Behringer
5	Alat Musik Modern/Band	1	5.500.000	Dynie
6	Alat Musik Modern/Band	1	2.750.000	Lokal
7	Alat Musik Modern/Band	1	5.885.000	Gillmore
8	Alat Musik Modern/Band	1	5.500.000	Dynie
9	Alat Musik Modern/Band	1	1.485.000	Behringer
10	Alat Musik Modern/Band	1	1.485.000	Behringer
11	Alat Musik Modern/Band	1	23.870.000	Yamaha
12	Alat Musik Modern/Band	1	5.500.000	Dynie
	Jumlah	12	83.490.000	

*Konstruksi Dalam
Pengerjaan
Rp 0*

C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp. 0 dan Rp 0. Pada tahun ini, Balai KIPM Surabaya I tidak melakukan pembangunan gedung.

*Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap Rp
(10.653.828.098)*

C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp (10.653.828.098) dan Rp (14.081.040.809). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Aset Tak Berwujud
Rp. 0

C.21 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp 0 dan Rp 0.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Tidak terdapat mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	-
Mutasi tambah:	
Pembelian	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2024	-
Akumulasi Amortisasi s.d. 30 September 2024	-
Nilai Buku per 31 Desember 2024	-

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Aset Tak berwujud 31 Desember 2024

Uraian	Nilai Perolehan
	0
	0
Jumlah	0

Aset Lain-Lain
Rp. 0

C.22 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp. 0 dan Rp. 0. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2023	-
Mutasi tambah:	
- reklasifikasi dari aset tetap	-
Mutasi kurang:	
- penggunaan kembali BMN yang dihentikan	-
- penghapusan BMN	-
Saldo per 31 Desember 2024	-
Akumulasi Penyusutan	-
Nilai Buku per 31 Desember 2024	-

Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya
Rp 0

C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing Rp 0 dan Rp 0. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
	0	0	0
Jumlah	0	0	0
Aset Lain-lain	0	0	0
Jumlah	0	0	0

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Uang Muka dari
KPPN RP 0

C.24 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN Balai KIPM Surabaya I per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp.

0 dan Rp 0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Sesuai LPJ Bendahara Pengeluaran Bulan Desember 2024 dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Uang muka dari KPPN per 31 Desember 2024

Keterangan	TA 2024
Uang Tunai di Brankas	0
Uang di Rekening Bank	0
Kwitansi UP	0
Jumlah	0

*Utang kepada
Pihak Ketiga
Rp 136.076.519*

C.25 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga Balai KIPM Surabaya I per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp 136.076.519 dan Rp 38.166.966. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada Balai KIPM Surabaya I per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

*Rincian Utang kepada Pihak Ketiga
Per 31 Desember 2024*

Uraian	Jumlah	Penjelasan
Utang kepada Pihak Ketiga	39,488,905	Pembayaran Belanja Pegawai berupa Tunjangan Kinerja Susulan bulan Desember tahun 2024 untuk 7 Pegawai (Puspa)
Utang kepada Pihak Ketiga	6,736,500	Biaya Langganan Air (PDAM) Kantor Balai KIPM Surabaya I Bulan Desember 2024 (Juanda)
Utang kepada Pihak Ketiga	1,635,931	Biaya Langganan internet Kantor Balai KIPM Surabaya I Bulan Desember 2024 (Juanda)

Utang kepada Pihak Ketiga	1,165,722	Biaya Langganan Telepon Balai KIPM Surabaya I Bulan Desember 2024 (Juanda)
Utang kepada Pihak Ketiga	973,494	Biaya Langganan Telepon Balai KIPM Surabaya I Bulan Desember 2024 (Puspa)
Utang kepada Pihak Ketiga	32,792,234	Biaya Langganan Listrik Balai KIPM Surabaya I Bulan Desember 2024 (Juanda)
Utang kepada Pihak Ketiga	48,607,654	Biaya Langganan Listrik Balai KIPM Surabaya I Bulan Desember 2024 (Puspa)
Utang kepada Pihak Ketiga	2,165,723	Biaya Langganan Internet Balai KIPM Surabaya I Bulan Desember 2024 (Puspa)
Utang kepada Pihak Ketiga	2,237,800	Pembayaran Belanja Pegawai berupa Kekurangan Gaji Pokok bulan Desember tahun 2024 untuk 8 Pegawai (Puspa)
Utang kepada Pihak Ketiga	470	Pembayaran Belanja Pegawai berupa Kekurangan Pembulatan Gaji PNS bulan Desember tahun 2024 untuk 8 Pegawai (Puspa)
Utang kepada Pihak Ketiga	174,770	Pembayaran Belanja Pegawai berupa Kekurangan Tunjangan Suami/Istri bulan Desember tahun 2024 untuk 8 Pegawai (Puspa)
Utang kepada Pihak Ketiga	57,316	Pembayaran Belanja Pegawai berupa Kekurangan Tunjangan Anak bulan Desember tahun 2024 untuk 8 Pegawai (Puspa)
Utang kepada Pihak Ketiga	40,000	Pembayaran Belanja Pegawai berupa Kekurangan Tunjangan Umum bulan Desember tahun 2024 untuk 8 Pegawai (Puspa)
Total	136,076,519	

Utang yang Belum
Ditagihkan
Rp 0

C.26 Utang yang Belum Ditagihkan

Nilai Utang yang Belum Ditagihkan Balai KIPM Surabaya I per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Utang yang Belum Ditagihkan merupakan transaksi atas pengakuan utang karena adanya BAST dari pihak ketiga dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Utang yang Belum Ditagihkan

Uraian	Jumlah
kuitansi UP yang belum di-SPM-kan	-
Total	-

*Beban yang Masih
Harus Dibayar
Rp0*

C.27 Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp 0 dan Rp 0, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar
per 31 Desember 2024 dan 2023*

Uraian	TA 2024	TA 2023
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	-	-
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	-	-
Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	-	-
Jumlah	-	-

*Utang Jangka
Pendek Lainnya
Rp. 0*

C.28 Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

*Perbandingan Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya
per 31 Desember 2024 dan 2023*

Uraian	TA 2024	TA 2023
Potongan pajak oleh bendahara pengeluaran yang belum disetor ke rekening kas negara	0	0
Jumlah	0	0

*Ekuitas
Rp. 32.856.994.365*

C.29 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp. 32.856.994.365 dan Rp. 33.426.928.920. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan PNBP
Rp 7.159.810.000

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan Balai KIPM Surabaya I dalam Laporan Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp. 7.159.810.000 dan Rp. 7.463.700.000. Pendapatan jasa berasal dari Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya serta Pendapatan Jasa Karantina Perikanan yang diperoleh oleh Balai KIPM Surabaya I selama periode 1 Januari 2024 hingga 31 Desember 2024.

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak
per 31 Desember 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Jasa	7,159,810,000	7,463,700,000	-4.07
Pendapatan Penjualan Aset			#DIV/0!
Pendapatan TAYL			#DIV/0!
Jumlah	7,159,810,000	7,463,700,000	-4.07

Rincian Pendapatan PNBP Balai KIPM Surabaya I dalam Laporan Operasional, LRA dan Neraca TA 2024 secara horizontal sebagai berikut :

ANALISIS HORIZONTAL LO, LRA, NERACA
Pada Pendapatan Negara Bukan Pajak

Pendapatan PNBP LO :			7,159,810,000
1	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	-
2	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	-
3	425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi	7,159,210,000
4	425332	Pendapatan Jasa karantina ikan	600,000

5	425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	-
6	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	-
7	425999	Pendapatan Anggaran Lain-Lain	-
8	425332	Pengembalian Pendapatan Jasa Karantina Ikan	-
Pendapatan PNBPA LRA :			7,161,301,314
PIUTANG PNBPA 2024 (NERACA)			259,073
PIUTANG PNBPA 2023 (NERACA)			736,314
Selisih :			(1,014,073)
Klarifikasi Selisih:			
1	425121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	
2	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	(755,000)
2	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN	-
3	425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai	-
4	425792	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara	-
5	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	(259,073)
6	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	-
7	425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL	-
8	391119	Koreksi lainnya	-
Klarifikasi Selisih PNBPA			(1,014,073)

Masih terdapat Pendapatan Jasa Karantina Perikanan dikarenakan Surat Pemberitahuan pemberlakuan PMK terbaru terlambat diterima (PMK no 27 Tahun 2024 yang diundangkan dan diberlakukan per 16 Mei 2024) dalam proses peralihan tersebut, sedangkan di lapangan proses pelayanan HC untuk ekspor produk perikanan (segar) tetap berjalan, jadi tetap dibuatkan HC.

Beban Pegawai
Rp 7.708.373.548

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada Laporan Operasional Balai

KIPM Surabaya I per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 7.708.373.548. Sementara beban pegawai untuk periode yang sama TA 2023 sebesar Rp 12.347.088.569. Penurunan Beban Pegawai disebabkan karena adanya mutasi sebanyak 39 pegawai ke Badan Karantina Indonesia mulai Bulan Maret 2024. Dari semula 87 pegawai menjadi 48 pegawai.

*Rincian Beban Pegawai
per 31 Desember 2024 dan 2023*

URAIAN	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji	2,926,249,227	4,598,915,229	(36.37)
Beban Tunjangan-tunjangan	4,381,907,321	7,046,123,340	(37.81)
Beban Honorarium (uang makan)	366,612,000	702,050,000	(47.78)
Beban Lembur	33,605,000		#DIV/0!
Jumlah beban pegawai	7,708,373,548	12,347,088,569	(37.57)

Rincian Jumlah Beban Pegawai Balai KIPM Surabaya I dalam Laporan Operasional, LRA dan Neraca TA 2024 secara horizontal sebagai berikut:

**ANALISIS HORIZONTAL LO, LRA, NERACA
Pada Beban Pegawai**

Beban Pegawai di LO (Netto)	7,708,373,548
Belanja Pegawai di LRA (Netto)	7,667,963,360
Saldo Akhir Belanja Pegawai yang masih harus dibayar Desember 2024	41,999,261
Saldo Awal Belanja Pegawai yang masih harus dibayar	0
Koreksi Penyesuaian	0
Jumlah	7,709,962,621
Selisih :	(1,589,073)
Klarifikasi Selisih:	
1 Jurnal balik belanja pegawai TAYL	(1,330,000)

2	Jurnal AkruaI Belanja Pegawai Yg Masih Harus di Bayar 31 Desember 2023	
3	Selisih Kenaikan Saldo Belanja Yang Masih Harus Dibayar (2024 dan 2023)	(1,330,000)
4	Piutang Belanja Pegawai Tahun 2024	(259,073)
4	Jurnal Balik Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran TAYL	0
5	Jurnal Balik Piutang Lainnya Belanja Pegawai Tahun 2021	0
6	Jurnal Balik 512411 Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	0
7	Penyisihan piutang tak tertagih	0
Klarifikasi Selisih Beban Pegawai		(1,589,073)

Beban Persediaan
Rp 508.853.287

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan Balai KIPM Surabaya I dalam Laporan Operasional per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp. 508.853.287 dan Rp. 979.524.329. Beban persediaan Balai KIPM Surabaya I per 31 Desember 2024 terdiri atas beban persediaan konsumsi Rp. 349.036.761 dan beban persediaan bahan baku Rp. 159.816.526. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Persediaan
per 31 Desember 2024 dan 2023*

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2024	TA 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	349,036,761	537,273,198	(35.04)
Beban Persediaan Bahan Baku	159,816,526	442,251,131	(63.86)
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan			-
Beban Persediaan suku cadang			-
Beban persediaan lainnya	-	-	-
Jumlah Beban Persediaan	508,853,287	979,524,329	(48.05)

Jumlah Beban Persediaan Balai KIPM Surabaya I dalam Laporan Operasional, LRA dan Neraca TA 2024 secara horizontal sebagai berikut :

Uraian	Nilai
Beban Persediaan	508,853,287
Total Realisasi Belanja Persediaan	371,118,249
Persediaan Awal Tahun	250,852,391
Persediaan Akhir Tahun	240,362,553
Koreksi Nilai Persediaan	-
Jumlah	381,608,087
Selisih	127,245,200
Klarifikasi Selisih	Nilai
Transfer Masuk Manual Persediaan (M03)	
Perolehan Lainnya (M06)	-
Reklasifikasi Masuk (M10)	-
Reklasifikasi Dari Aset (M11)	-
Transfer Masuk Online Persediaan (M13)	130,189,000
Koreksi Transfer Keluar Online (M95)	-
Koreksi Nilai Tambah (M98)	-
Koreksi Kuantitas Tambah (M99)	-
Transfer Keluar Manual Persediaan (K02)	-
Persediaan Usang (K04)	-
Persediaan Rusak (K05)	-
Keluar Lainnya (K06)	-
Reklasifikasi Keluar (K10)	-
Reklasifikasi Ke Aset (K11)	-
Transfer keluar Online Persediaan (K13)	(226,100)
Koreksi Nilai Kurang (K98)	-
Beban Persediaan Untuk Pemeliharaan	(6,500)
Beban Suku Cadang	(2,711,200)
Kuitansi Persediaan Sept'2024 yang SPM Okt'2024	-
Klarifikasi Selisih Persediaan	127,245,200

*Beban Barang
dan Jasa Rp
4.075.061.988*

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa Balai KIPM Surabaya I dalam Laporan Operasional per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 4.075.061.988. Apabila dibandingkan dengan beban barang dan jasa pada periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 3.474.398.751, maka terdapat kenaikan sebesar Rp 600.663.237.

Beban Barang dan Jasa Balai KIPM Surabaya I per 31 Desember 2024 terdiri atas Keperluan Perkantoran Rp. 1.668.914.912, Surat Dinas Pos Rp. 20.237.245, Honor Operasional Satker Rp. 176.850.000, Barang Operasional Lainnya Rp. 104.575.700, bahan Rp. 172.989.763, Barang Non Operasional Lainnya Rp. 29.000.000, listrik Rp. 436.874.838, telepon Rp. 44.474.880, air Rp. 13.037.550, jasa profesi Rp. 51.400.000, jasa lainnya Rp. 1.263.657.100 dan sewa Rp. 93.050.000.

Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Barang dan Jasa
per 31 Desember 2024 dan 2023*

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2024	TA 2023	NAIK (TURUN) %
Keperluan Perkantoran	1,668,914,912	1,547,019,057	7.88
Daya Tahan Tubuh		64,773,828	-100.00
Surat Dinas Pos	20,237,245	22,181,100	-8.76
Honor Operasional Satker	176,850,000	205,680,000	-14.02
Barang Operasional Lainnya	104,575,700	137,939,500	-24.19
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19			#DIV/0!
Bahan	172,989,763	248,097,939	-30.27
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19			#DIV/0!
Barang Non Operasional Lainnya	29,000,000	19,000,000	52.63
Listrik	436,874,838	407,771,442	7.14
Telepon	44,474,880	65,647,185	-32.25

Air	13,037,550	4,434,700	193.99
Langganan Daya dan Jasa Lainnya			#DIV/0!
Sewa	93,050,000	175,747,000	-47.05
Jasa Profesi	51,400,000	68,800,000	-25.29
Jasa Lainnya	1,263,657,100	507,307,000	149.09
Jumlah	4,075,061,988	3,474,398,751	17.29

Jumlah Beban Barang dan Jasa berupa sewa Balai KIPM Surabaya I dalam Laporan Operasional, LRA dan Neraca TA 2024 secara horizontal sebagai berikut :

**ANALISIS HORIZONTAL LO, LRA, NERACA
Pada Beban Sewa**

Beban sewa di neraca percobaan akrual		93,050,000
Belanja sewa di LRA Belanja(Netto)		70,175,000
Saldo Akhir Belanja Barang dan jasa yang masih harus dibayar 2024		
Saldo Awal Belanja Barang dan jasa yang masih harus dibayar		
Koreksi Penyesuaian		0
Jumlah		70,175,000
Selisih :		22,875,000
Klarifikasi Selisih:		
1	Kuitansi bulan Juni yang diajukan GUPnya di bulan Juli	
2	Jurnal Akrual Belanja Barang dan jasa Yg Masih Harus di Bayar 31 Desember 2024	0
3	Selisih Kenaikan Saldo Belanja Yang Masih Harus Dibayar (2023 dan 2022)	0
4	Piutang Lainnya Belanja Barang dan jasa Tahun 2023	0
4	Jurnal Balik Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran TAYL	0
5	Jurnal Balik Piutang Lainnya Belanja Barang dan jasa Tahun 2021	22,875,000
6	<i>Jurnal Balik Belanja sewa Wilker Banyuwangi dan Malang</i>	22,875,000
7	Penyisihan piutang tak tertagih	0
Klarifikasi Selisih Beban Barang dan jasa		0

Beban
Pemeliharaan Rp.
946.871.872

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Balai KIPM Surabaya I per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 946.871.872 sementara pada periode yang sama tahun lalu Rp. 980.657.546.

Beban pemeliharaan Balai KIPM Surabaya I per 31 Desember 2024 terdiri atas Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rp. 459.115.451, Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp. 485.038.721, Beban persediaan untuk pemeliharaan Rp. 6.500 dan Beban persediaan suku cadang Rp. 2.711.200.

Rincian beban pemeliharaan untuk 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan
Per 31 Desember 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2024	TA 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	459,115,451	355,009,368	29.32
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	485,038,721	556,151,104	-12.79
Beban persediaan untuk pemeliharaan	6,500	52,800	-87.69
Beban persediaan suku cadang	2,711,200	69,444,274	-96.10
Beban Pemeliharaan jaringan		0	-
Jumlah	946,871,872	980,657,546	-3.45

Beban Perjalanan
Dinas Rp
934.880.911

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Balai KIPM Surabaya I dalam Laporan Operasional per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 934.880.911 sementara pada periode yang sama tahun 2023 sebesar Rp 1.542.140.301.

Beban Perjalanan Dinas Balai KIPM Surabaya I per 31 Desember 2024 terdiri atas Perjalanan Biasa Rp. 674.303.961, Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp. 60.771.000, Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam

Kota Rp. 48.500.000 dan Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Rp 151.305.950.

Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Perjalanan Dinas
per 31 Desember 2024 dan 2023*

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2024	TA 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0.00
Beban Perjalanan Biasa	674,303,961	938,198,116	-28.13
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	60,771,000	71,214,000	-14.66
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	48,500,000		0.00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	151,305,950	532,728,185	-71.60
Belanja Modal BLU	0	0	0.00
Jumlah	934,880,911	1,542,140,301	-39.38

Jumlah Beban Perjalanan Dinas Balai KIPM Surabaya I dalam Laporan Operasional, LRA dan Neraca TA 2024 secara horizontal sebagai berikut :

**ANALISIS HORIZONTAL LO, LRA, NERACA
PADA BEBAN PERJALANAN DINAS**

Beban Perdin di LO (Netto)		934,880,911
Belanja Perdin di LRA (Netto)		934,880,911
Saldo Akhir Belanja Perdin yang masih harus dibayar 2024		934,880,911
Saldo Awal Belanja Perdin yang masih harus dibayar		934,880,911
Koreksi Penyesuaian		0
Jumlah		934,880,911
Selisih :		0
Klarifikasi Selisih:		
Kuitansi Perjalanan Dinas		0
Jurnal AkruaI Belanja Perdin Yg Masih Harus di Bayar 31 Desember 2024		
Selisih Kenaikan Saldo Belanja Yang Masih Harus Dibayar (2024 dan 2023)		0
Piutang Lainnya Belanja Perdin Tahun 2024		0
Jurnal Balik Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran TAYL		0
Jurnal Balik Piutang Lainnya Belanja Perdin Tahun 2023		0
Jurnal Balik 512411 Belanja Perdin (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)		0
Penyisihan piutang tak tertagih		0
Klarifikasi Selisih Beban Perdin		0

Beban Barang
untuk Diserahkan
kepada
Masyarakat
Rp0

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Balai KIPM Surabaya I per 31 Desember 2024 sebesar Rp0 sementara pada periode yang sama tahun lalu sebesar Rp0. (tidak terdapat kenaikan/penurunan)

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat
Per 31 Desember 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2024	TA 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	#DIV/0!
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	#DIV/0!
Jumlah	0	0	#DIV/0!

Beban Bantuan
Sosial Rp0

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial Balai KIPM Surabaya I per 31 Desember 2024 sebesar Rp0 sementara pada periode yang sama tahun lalu sebesar Rp0. (tidak terdapat kenaikan/penurunan)

Rincian Beban Bantuan Sosial untuk per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Bantuan Sosial
per 31 Desember 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2024	TA 2023	% NAIK (TURUN)
Beban Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial	0	0	#DIV/0!
Beban Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial	0	0	#DIV/0!
Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial	0	0	#DIV/0!
Jumlah	0	0	#DIV/0!

Beban
Penyusutan dan
Amortisasi
Rp . 784.409.771

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi Balai KIPM Surabaya I periode Tahunan 31 Desember 2024 sebesar Rp. 784.409.771, terdapat penurunan sebesar Rp. (280.667.540) apabila dibandingkan dengan periode yang

sama tahun lalu yaitu sebesar Rp 1.065.077.311.

Beban Penyusutan dan Amortisasi Balai KIPM Surabaya I per 31 Desember 2024 terdiri atas penyusutan peralatan dan mesin Rp. 540.927.076, penyusutan gedung dan bangunan Rp. 224.926.711, penyusutan jalan dan jembatan Rp. 18.079.500, penyusutan irigasi Rp. 209.647 dan penyusutan jaringan Rp. 266.837.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
Per 31 Desember 2024 dan 2023*

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TA 2024	TA 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	540,927,076	821,594,616	(34.16)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	224,926,711	224,926,711	-
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	18,079,500	18,079,500	-
Beban Penyusutan Irigasi	209,647	209,647	-
Beban Penyusutan Jaringan	266,837	266,837	-
Beban Penyusutan Aset Tetap yg tidak di gunakan dalam operasional	-	-	-
Jumlah Penyusutan	784,409,771	1,065,077,311	(26.35)
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	-	-	-
Beban Penyusutan aset lain-lain	-	-	-
Jumlah Amortisasi	-	-	-
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	784,409,771	1,065,077,311	(26.35)

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi Balai KIPM Surabaya I dalam Laporan Operasional, LRA dan Neraca TA 2024 secara horizontal sebagai berikut :

ANALISIS HORIZONTAL PENYUSUTAN DAN AMORTISASI

BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI (LO)	784,409,771
AKUMULASI PENYUSUTAN 2024	(10,653,828,098)
AKUMULASI PENYUSUTAN 2023	(14,081,040,809)
	3,427,212,711
AKUMULASI AMORTISASI/PENYUSUTAN 2024	
AKUMULASI AMORTISASI/PENYUSUTAN 2023	
	-
Total Penyusutan dan Amortisasi Thn Berjalan	3,427,212,711
Selisih	4,211,622,482

URAIAN	SALDO AWAL PENYUSUTAN	BEBAN PENYUSUTAN NERACA PERCOBAAN
Penyusutan Peralatan dan Mesin	12,500,102,044	540,927,076
Penyusutan Gedung dan	1,347,044,332	224,926,711
Penyusutan Jalan dan Jembatan	144,917,750	18,079,500.00
Penyusutan Irigasi	1,362,708	209,647
Penyusutan Jaringan	4,123,975	266,837
Penyusutan Aset Tetap Renovasi	-	-
Penyusutan Aset Tetap Lainnya	83,490,000	-
JUMLAH ASET TETAP	14,081,040,809	784,409,771
Amortisasi Aset Tetap yang tidak diunakan	-	-
Amortisasi Software	-	-

Penjelasan Selisih Peralatan dan

Koreksi Saldo Awal (100)
Pembelian (101)
Transfer Masuk (102)
Reklasifikasi Masuk (107)
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah (204)
Transfer Keluar (302)
Reklasifikasi Keluar (304)
Reklasifikasi Keluar ke Persediaan (315)
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan (401)
Penggunaan kembali BMN (402)
Saldo transfer keluar di neraca percobaan akrual
Reklas Dari Aset Lainnya Ke Aset Tetap (177)
Penyusutan Transaksional Pembelian Pada Penyusutan Transaksional Pembelian Pada Palangkaraya
Penyusutan Transaksional Reklasifikasi Kelu

Beban Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih Rp1.295

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Balai KIPM Surabaya I per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.295 dan Rp3.682. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih berupa penyisihan pengembalian uang makan untuk 2 pegawai dan tunjangan kinerja untuk 13 pegawai bulan Desember 2024. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
31 Desember 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2024	TA 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	1,295	3,682	(64.83)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Non Lancar	0	0	#DIV/0!
Jumlah	1,295	3,682	(64.83)

Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Balai KIPM Surabaya I dalam Laporan Operasional, LRA dan Neraca TA 2024 secara horizontal sebagai berikut :

ANALISIS HORIZONTAL LO, LRA, NERACA Pada Pendapatan Negara Bukan Pajak

BEBAN PENYISIHAN PIUTANG PADA LO			1,295
1	594211	Beban Penyisihan Piutang PNB	-
2	594212	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	1,295
AKUMULASI PENYISIHAN PIUTANG 2023			-
AKUMULASI PENYISIHAN PIUTANG 2022			-
Selisih :			1,295
Klarifikasi Selisih:			
1		Penyisihan piutang 2024	1,295
Klarifikasi Selisih:			1,295

Surplus/Defisit
dari Kegiatan Non
Operasional
Rp. 15.000

D.11 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional 31 Desember 2024 berasal dari pendapatan Lelang peralatan dan mesin pada bulan November 2024. Rincian Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional
Per 31 Desember 2024 dan 2023

URAIAN	TA 2024	TA 2023	NAIK (TURUN) %
Surplus/Depisit pelepasan aset non lancar	15,000	6,873,000	
Pendapatan pelepasan aset non lancar	755,000	10,599,000	-
Beban pelepasan aset non lancar	740,000	3,726,000	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	8,000,212	
Pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya	0	8,000,212	- 100
Beban Kegiatan	0		#DIV/0!
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	15,000	14,873,212	-99.90

Pos Luar Biasa
Rp0

D.12 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Pos Luar Biasa
per 31 Desember 2024 dan 2023

URAIAN	TA 2024	TA 2023	NAIK (TURUN) %
Pendapatan PNB	0	-	-
Beban Perjalanan Dinas	0	-	-
Beban Persediaan	0	-	-
Jumlah	0	-	-

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

*Ekuitas Awal Rp
33.426.928.920*

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 33.426.928.920 dan Rp 33.846.657.845.

*Defisit LO
Rp (7.798.627.672)*

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO Balai KIPM Surabaya I untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp (7.798.627.672), naik sebesar Rp (5.111.689.605) dari tahun 2023 sebesar Rp (12.910.317.277).

*Penyesuaian Nilai
Aset
Rp0*

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

*Koreksi Nilai
Persediaan Rp 0*

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam

pecatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0.

Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Koreksi
Pita Cukai, Materai dan Leges	-
Barang Konsumsi	-
Suku Cadang	-
Jumlah	-

*Selisih Revaluasi
Aset Tetap Rp0*

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

*Koreksi Aset Tetap
Non Revaluasi Rp0*

E.3.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Peralatan dan Mesin	-
Gedung dan Bangunan	-
Jumlah	-

Koreksi Lain-Lain Rp
3.682

E.3.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain Balai KIPM Surabaya I untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp. 3.682 dan Rp0. Koreksi lain-lain Balai KIPM Surabaya I periode Desember 2024 adalah koreksi piutang berupa jurnal balik akrual Penyisihan Piutang Pengembalian tunjangan kinerja dan uang makan bulan Desember 2023 sebesar Rp. 3.682.

Rincian Koreksi Lain-Lain

Jenis Beban	Jumlah Koreksi
Koreksi Beban	-
Koreksi Pendapatan	-
Koreksi Piutang	3.682
Koreksi Kewajiban	-
Koreksi Hibah	-
Jumlah	3.682

Transaksi Antar
Entitas
Rp 7.228.689.435

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp. 7.228.689.435 dan Rp. 12.490.588.352. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	15,097,880,829
Diterima dari Entitas Lain	(7,161,301,314)
Transfer Masuk	130,189,000
Transfer Keluar	(838,079,080)
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
Jumlah	7,228,689,435

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). DDEL merupakan nilai pendapatan di LRA (Jasa, penjualan aset, TAYL), pada periode hingga 31 Desember 2024, sebesar Rp (7.161.301.314) sedangkan DKEL merupakan nilai belanja di LRA sebesar Rp 15.097.880.829.

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer masuk persediaan barang konsumsi berupa Sertifikat Kesehatan Ikan dari Sekretariat BKIPM pada Periode Tahun Anggaran 2024 sejumlah 14.275 eksemplar dengan berbagai jenis dengan nilai total keseluruhan Rp.130.189.000.

UAPB : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
 UAPPB-E1 : BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIK
 UAPPB-W : SEKRETARIAT BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN M UTU DAN KEAMAN

**DAFTAR TRANSAKSI PERSEDIAA
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31
 TAHUN ANGGARAN : 2024**

NAMA UAKPB : BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKA
 KODE UAKPB : 032.13.0500.427542.000.KD

JENIS TRANSAKSI : M13 - Transfer Masuk Online

KODE	URAIAN	KUANT
117111	Barang Konsumsi	
1010301014	Barang Cetak	
000012	SERTIFIKAT MUTU A (2020)	
000013	SERTIFIKAT MUTU B (2020)	

Sedangkan transfer keluar senilai Rp 838.079.080 pada Tahun Anggaran 2024, per 31 Desember 2024. Transfer keluar persediaan ke Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Denpasar, Berita Acara Serah Terima Barang Persediaan Sertifikat Kesehatan Ikan dan Mutu Hasil Perikanan 306/BKIPM.SBY.I/PL.450/I/2024 tanggal 24 Januari 2024 dengan jenis Sertifikat Mutu Kode B sejumlah 17 eksemplar dengan nomor seri 210019759 – 210019775 senilai Rp 226.100.

Transfer keluar aset ke Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jawa Timur, Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 840/SJ/PL.450/X/2024 dan 8892/PL.330/B/10/2024 tentang Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Kepada Badan Karantina Indonesia senilai Rp 4.785.984.452 dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Transfer Keluar Aset dan Persediaan		
JUMLAH	NILAI	
160	4,451,134,452	BKHIT JA
8	80,370,000	MANADO
8	84,750,000	MERAUKE
4	95,320,000	PALEMBA
4	74,410,000	PEKANBA
184	4,785,984,452	
TRANSFER KELUAR ASET		
TRANSFER KELUAR PERSEDIAAN		

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp0 dari total Rp0 yang diterima sepanjang tahun 2024.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 adalah Rp 0.

Rincian pengesahan Hibah untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No	Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Hibah
1	WHO	Uang	Rp -
2	PT Semua Bahagia	Barang	Rp -
Total Pengesahan			Rp -
Pengesahan Pengembalian Hibah			Rp -
Jumlah			Rp -

Ekuitas Akhir

Rp 32.856.994.365

E.6 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing - masing sebesar Rp. 32.856.994.365 dan Rp. 33.426.928.920.

F PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.**F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH
TANGGAL NERACA**

Tidak ada kejadian-kejadian penting yang menyebabkan perubahan setelah tanggal neraca di laporkan.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN - LAIN

1. Laporan Keuangan Periode Tahun 2024 Balai KIPM Surabaya I disajikan berdasarkan hasil Aplikasi SAKTI dengan data transaksi yang terbuku sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.
2. Selama periode berjalan, Kantor Balai KIPM Surabaya I melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2024 sebanyak 22 kali dan dengan perubahan total pagu anggaran DIPA semula sebesar Rp. 21.359.900.000 menjadi Rp 15.337.348.000. Berikut revisi DIPA yang dilakukan Balai KIPM Surabaya I yaitu :
 - a. Revisi I: tanggal 15 Januari 2024, Realokasi Anggaran ke Badan Karantina Indonesia. Hal ini mengakibatkan perubahan total pagu anggaran semula (revisi terlampir).
 - b. Revisi II: Pemuktahiran Halaman III DIPA TW-1 tanggal 15 Januari 2024. Hal ini tidak mengakibatkan perubahan total pagu anggaran semula (revisi terlampir).

- c. Revisi III: Pemuktahiran Halaman III DIPA TW-1 tanggal 16 Februari 2024. Hal ini tidak mengakibatkan perubahan total pagu anggaran semula (revisi terlampir).
- d. Revisi IV: Pemuktahiran Halaman III DIPA TW-2 tanggal 17 April 2024. Hal ini tidak mengakibatkan perubahan total pagu anggaran semula (revisi terlampir).
- e. Revisi V: Pemuktahiran KPA tanggal 6 Mei 2024. Hal ini tidak mengakibatkan perubahan total pagu anggaran semula (revisi terlampir).
- f. Revisi VI: Pemuktahiran Halaman III DIPA TW-2 tanggal 30 Mei 2024. Hal ini tidak mengakibatkan perubahan total pagu anggaran semula (revisi terlampir).
- g. Revisi VII: Pemuktahiran KPA tanggal 31 Mei 2024. Hal ini tidak mengakibatkan perubahan total pagu anggaran semula (revisi terlampir).
- h. Revisi VIII: Pemuktahiran KPA tanggal 11 Juni 2024. Hal ini tidak mengakibatkan perubahan total pagu anggaran semula (revisi terlampir)
- i. Revisi IX: Revisi Buka Blokir KRO 3990 tanggal 23 Juli 2024. Hal ini mengakibatkan perubahan total pagu anggaran semula (revisi terlampir)
- j. Revisi X: Pemuktahiran KPA tanggal 25 Juli 2024. Hal ini tidak mengakibatkan perubahan total pagu anggaran semula (revisi terlampir)

- k. Revisi XI: Pemuktahiran KPA tanggal 31 Juli 2024. Hal ini tidak mengakibatkan perubahan total pagu anggaran semula (revisi terlampir)
- l. Revisi XII: Realokasi Anggaran ke Balai KIPM Surabaya II tanggal 21 Agustus 2024. Hal ini mengakibatkan perubahan total pagu anggaran semula (revisi terlampir)
- m. Revisi XIII: Pemuktahiran KPA tanggal 23 Agustus 2024. Hal ini tidak mengakibatkan perubahan total pagu anggaran semula (revisi terlampir)
- n. Revisi XIV: Pemuktahiran KPA tanggal 17 September 2024. Hal ini tidak mengakibatkan perubahan total pagu anggaran semula (revisi terlampir)
- o. Revisi XV: Pemuktahiran KPA tanggal 20 September 2024. Hal ini tidak mengakibatkan perubahan total pagu anggaran semula (revisi terlampir)
- p. Revisi XVI: Halaman III DIPA Triwulan IV. tanggal 1 Oktober 2024. Hal ini tidak mengakibatkan perubahan total pagu anggaran semula (revisi terlampir)
- q. Revisi XVII: Halaman III DIPA Triwulan IV. tanggal 15 Oktober 2024. Hal ini tidak mengakibatkan perubahan total pagu anggaran semula (revisi terlampir)
- r. Revisi XVIII: Pemuktahiran KPA. tanggal 22 Oktober 2024. Hal ini tidak mengakibatkan perubahan total pagu anggaran semula (revisi terlampir)

- s. Revisi XIX: Penambahan Belanja Operasional. tanggal 5 November 2024. Hal ini mengakibatkan perubahan total pagu anggaran semula (revisi terlampir)
 - t. Revisi XX: Pemuktahiran KPA. tanggal 7 November 2024. Hal ini tidak mengakibatkan perubahan total pagu anggaran semula (revisi terlampir)
 - u. Revisi XXI: Blokir Perjalanan Dinas. tanggal 14 November 2024. Hal ini tidak mengakibatkan perubahan total pagu anggaran semula (revisi terlampir)
 - v. Revisi XXII: Pemuktahiran KPA. tanggal 9 Desember 2024. Hal ini tidak mengakibatkan perubahan total pagu anggaran semula (revisi terlampir)
3. Pengungkapan Capaian Rincian Output Per Fungsi APBN (lihat lampiran)
4. Pengungkapan Program Prioritas Nasional (lihat lampiran)

LAMPIRAN